

Policy Brief

Beragama di Media Sosial: Menyatukan atau Memecah Bangsa?



Sumber: cdnupload.aa.com.ar

Temuan

1. Diskursus keagamaan di dunia maya, didominasi oleh pemahaman konservatisme dengan presentase 67.2%, disusul oleh paham moderat, liberal, dan islamis.
2. Konteks politik berperan penting dalam konstruksi narasi agama di media sosial. Penggunaan narasi keagamaan untuk kepentingan politik berdampak pada peningkatan paham konservatisme agama.
3. Akun dengan pandangan yang islamis dan konservatif mendominasi viralitas tweet keagamaan. Sedangkan akun moderat masih lebih sedikit dibandingkan dengan akun kategori sebelumnya.
4. Dalam semua kategori paham keagamaan, perempuan memiliki proporsi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Narasi gender dan agama di media sosial didominasi oleh narasi konservatif terkait perempuan yang cenderung menolak ide kesetaraan gender
5. Setiap akun sosial media memiliki kesempatan untuk memegang otoritas dan pengaruh yang tinggi dalam menyebarkan narasi agama meskipun dengan basis follower kecil atau tanpa otoritas keagamaan yang sah.

Latar Belakang

Ada hubungan yang cukup dekat antara konservativisme dan ekstremisme. Studi dari Lazar Stankov (2018) memperlihatkan bahwa mereka saling terhubung karena sama-sama menganggap negara Barat itu adalah sumber kejahatan, agama atau kepercayaan dapat membawa pada utopia, dan hanya mempercayai kelompok yang punya pandangan sejalan. Tiga hal ini disebut oleh Stankov sebagai sentimen (grudge), dalih keagamaan (religiosity), dan dominasi sosial (social dominance).

Bertalian dengan hal tersebut, penelitian PPIM UIN Jakarta memperlihatkan bahwa narasi konservativisme merajai media sosial. Media baru semakin sering digunakan sebagai panduan primer dalam beragama. Masyarakat dengan leluasa dapat memilih pola-pola komunikasi spiritual yang dianggap cocok dan sesuai selera. Sehingga mereka merasa nyaman dalam berdiskusi pada komunitas religius virtual yang mereka sukai. Media sosial kemudian banyak digunakan untuk mentransmisi paham dan ideologi keagamaan yang terjadi di tengah fenomena keagamaan virtual misalnya, untuk menyebarkan pemahaman konservatif, fundamentalisme beragama, radikalisme, islamisme, hingga ekstremisme.

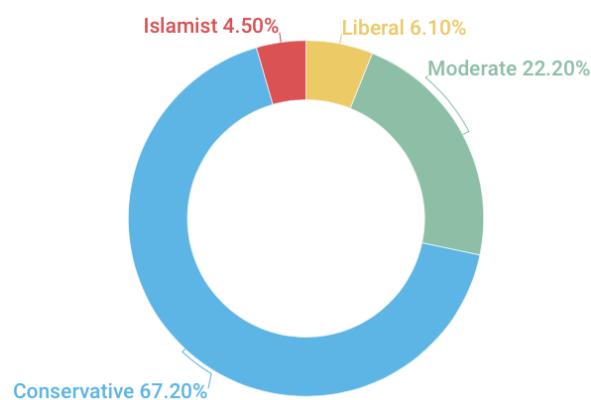
Penelitian ini fokus pada tiga isu utama: 1) paham dan narasi keagamaan yang berkembang di media sosial berikut pola persebarannya, 2) fragmentasi otoritas, aktor, dan jaringan antar aktor dalam penyebaran pemahaman keagamaan, dan 3) perubahan narasi keagamaan pada konteks sosial dan pengaruhnya pada kompetisi elit politik.

Selain itu, penelitian ini memaksimalkan big data analysis, dan menggunakan data dari Twitter dalam timeframe 1 dekade (2009-2019). Dari periode waktu tersebut, 1,9 juta tweet terkumpul dan dari sejumlah tweet itu dilakukan filterisasi menjadi 458,582 tweet dari 100,799 user dengan 7,367,190 follower-nya..

Apa yang Data Katakan tentang Konservativisme di Twitter?

1. Dominasi Konservativisme Agama

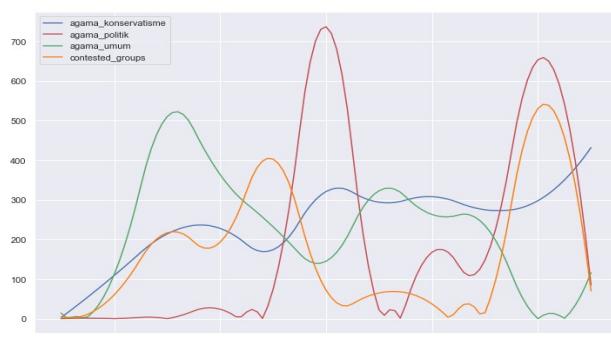
Pemahaman konservativisme agama paling banyak menguasai diskursus keagamaan di ranah maya dengan presentase 67.2%, disusul oleh paham moderat, liberal, dan islamis.



Gambar 1 Proporsi Paham Keagamaan di Media Sosial

2. Politisasi Narasi Keagamaan

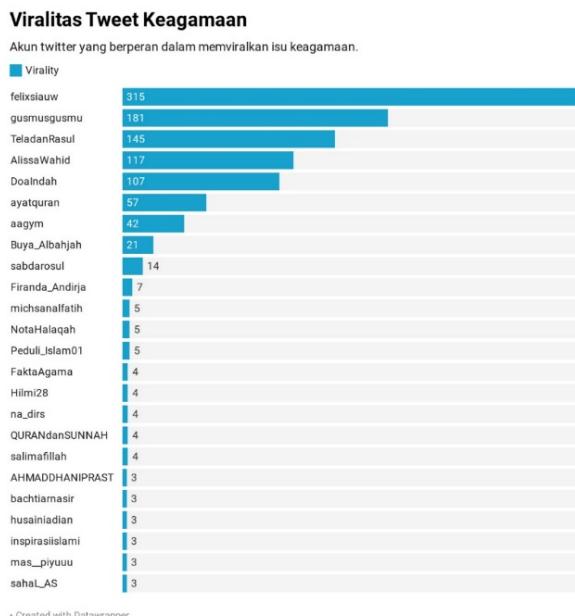
Penggunaan narasi keagamaan untuk kepentingan politik berdampak pada peningkatan paham konservativisme agama di media sosial terlihat dari tingginya keterkaitan isu agama dan politik. Konteks politik berperan penting dalam konstruksi narasi agama di media sosial. Perkembangan isu agama di twitter dipengaruhi oleh dinamika politik.



Gambar 2 Dinamika Politik dan Narasi Agama

3. Viralitas Akun Islamis dan Konservatif

Akun dengan pandangan yang islamis dan konservatif mendominasi viralitas tweet keagamaan. Akun moderat masih lebih sedikit dibandingkan dengan akun kategori sebelumnya.



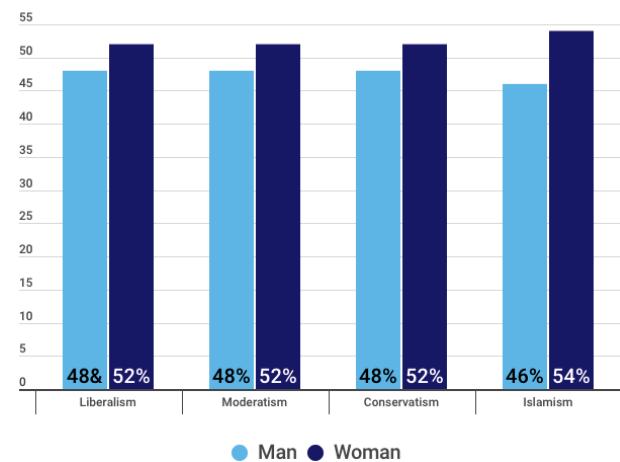
Gambar 3 Akun Sentral dan Viralitas Tweet Keagamaan

4. Gender dan Paham Keagamaan

Narasi gender dan agama di media sosial masih didominasi oleh narasi konservatif terkait perempuan yang cenderung menolak ide kesetaraan gender (Gambar 5). Temuan juga menunjukkan bahwa di semua kategori paham keagamaan, perempuan memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki meski perbedaannya tidak terlalu tinggi (Gambar 6).



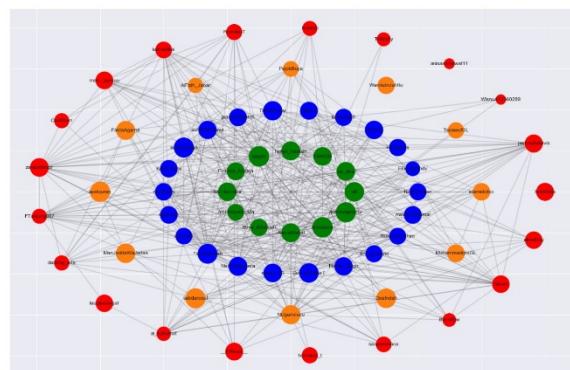
Gambar 4 Narasi Gender dan Agama di Media Sosial



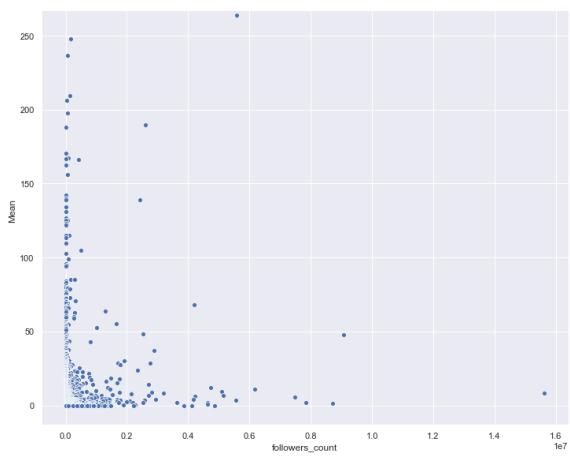
Gambar 5 Proporsi Gender dan Paham Keagamaan

5. Fragmentasi Otoritas Keagamaan

Hasil penelitian ini menunjukkan siapa saja bisa memiliki otoritas dan pengaruh yang tinggi dalam menyebarkan narasi agama meskipun dengan basis follower kecil atau tanpa otoritas keagamaan yang sah.



Gambar 6 Fragmentasi Otoritas dan Jaringan antar tokoh sentral



Gambar 7 Hubungan antara Follower dan Tingkat Engagement



Rekomendasi Kebijakan

Sebagai salah satu kementerian koordinator di Indonesia, Kementerian Koordinator Poltik Hukum dan HAM (KEMENKO POLHUKAM) sangat strategis mengubah pola interaksi masyarakat di ruang digital khususnya dalam media sosial melalui fungsi-fungsi kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Ruang digital menjadi salah satu tantangan penting dalam mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 yang dengan jelas menjadi salah satu target capaian pemerintah pada RPJMN IV tahun 2020-2024. Pada RPJMN tersebut pula Kemenko Polhukam memiliki lima arah kebijakan, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantauan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta Pementapan Stabilitas Keamanan Nasional. Untuk mendukung arah kebijakan Kemenko Polhukam tersebut, hasil penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1) Merumuskan definisi yang spesifik sekaligus membuat indikator-indikator khusus dalam melihat “Ancaman Negara” pada konteks media sosial

Kemenko Polhukam sejatinya sudah sangat menyadari sumber-sumber ancaman terhadap negara baik bersifat tradisional dan non-tradisional. Dalam Renstra Kemenko Polhukam tahun 2015-2019 disebutkan program dan kebijakan yang telah berhasil dilaksanakan dalam upaya meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan, seperti *Minimum Essential Force* (MEF) dan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk mengoptimalkan keijakan tersebut, Kemenko Polhukam perlu melihat lebih jauh ancaman negara dalam konteks media sosial. Kemenko Polhukam perlu merumuskan definisi yang spesifik berikut dengan merumuskan indikator-indikator jelas yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap negara. Narasi yang berkembang dalam media sosial khususnya narasi keagamaan cenderung didominasi corak paham keagamaan konservatif yang kemudian berpotensi mengikis kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia ketika diekspresikan dalam sikap politik.

2) Memperjelas Substansi SARA dalam UU ITE

Langkah Kemenko Polhukam dalam mendorong perubahan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatik RI merupakan langkah yang tepat. Selain itu, Kemenkominfo merupakan kementerian yang langsung berada dibawah koordinasi Kemenko Polhukam. Sejak disahkan di tahun 2008 dan pasca perubahan pada tahun 2016, UU tetap belum mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam ‘bermedsos’. Narasi-narasi keagamaan yang berkembang dan viral seringkali dinilai melanggar dari sisi SARA sehingga menimbulkan perpecahan. Maka penting bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kemenko Polhukam untuk memperjelas konteks SARA yang dimaksud dalam UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan narasi keagamaan di media sosial sangat mudah menjadi tersebar dan viral. Dalam menjalankan kebijakan ini, Kemenko Polhukam perlu melibatkan K/L terkait dalam kajian keagamaan seperti Kementerian Agama dan Ormas Islam (NU, Muhammadiyah, dan MUI).

3) Keberlanjutan Program Edukasi Literasi Kepada Generasi Milenial

Di tahun 2018, Kemenko Polhukam sudah sukses menjalankan program edukasi literasi langsung kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia. Program ini merupakan implementasi dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 tentang Bela Negara,

dengan memahami sumber ancaman negara yang multidimensional. Secara khusus program edukasi literasi menyasar aspek digital dan media sosial. Program demikian juga sudah dijalankan bagi kalangan ASN yang ada di kementerian sebagai upaya reformasi birokrasi. Sayangnya program edukasi kepada masyarakat ini tidak berlanjut di tahun-tahun setelahnya. Reformasi literasi sesungguhnya tidak cukup hanya berada di kalangan ASN. Hasil penelitian menunjukkan jumlah pengguna internet dan media sosial di masyarakat terus mengalami peningkatan dengan generasi milenial sebagai pengguna aktif media sosial. Pemberian edukasi dalam skala luas dan masif secara berkesinambungan kepada masyarakat dapat mengoptimalkan dan mendukung program-program Kemenko Polhukam yang menyasar konteks internet dan media sosial.

4) Peran Aktif Pemerintah dalam Menggunakan *Search Engine Optimization (SEO)* di Mesin Pencari Maupun Media Sosial untuk Meningkatkan Popularitas Akun-Akun Moderat

Temuan riset kami menunjukkan akun-akun yang cenderung konservatif lebih popular di Media Sosial. Oleh karena itu, penting untuk mendorong popularitas akun-akun yang memiliki pandangan keagamaan yang moderat untuk mengimbangi narasi-narasi konservatif yang berkembang di media sosial.



MERIT Indonesia

Media and Religious Trend in Indonesia (MERIT)

presented by

PPIM UIN Jakarta

Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia
Tel: +62 21 7499272 | E-mail: ppim@uinjkt.ac.id | Website: <https://ppim.uinjkt.ac.id>